

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ISLAM DI DESA PEMATANG TENGAH
KECAMATAN TANJUNG PURA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh

**IRMA YANI
NIM : 13.14.3.006**

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ISLAM DI DESA PEMATANG TENGAH
KECAMATAN TANJUNG PURA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh :

**Irma Yani
NIM : 13.14.3.006**

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H Abdullah, M.Si.
NIP. 196212311989031047**

**Salamuddin, MA.
NIP. 1974 07192007011014**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Nomor : Istimewa

Medan, Mei 2018

Lamp : 7 (tujuh) Exp.

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

An. Irma Yani

Dan Komunikasi UIN Su

Di-

Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Irma Yani yang berjudul; Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa pematang Tengah, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H Abdulla, M. Si.

Salamuddin, MA.

NIP. 196212311989031047

NIP. 1974 07192007011014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Yani

Nim : 13143006

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang
Tengah Kecamatan Tanjung Pura.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh institut batal saya terima.

Medan, 3 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

Irma Yani
NIM: 13.14.3.006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683
Medan Estate 20371

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura**, An. Irma Yani, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 05 Juli 2018, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003

Salamuddin, MA
NIP.19740719 200701 1 014

Anggota Penguji:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Rubino, MA
NIP. 19731229 199903 1 001 | 1. |
| 2. Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003 | 2..... |
| 3. Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si
NIP. 19621231 198903 1 047 | 3..... |
| 4. Salamuddin, MA
NIP. 19740719 200701 1 014 | 4..... |

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA**

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005

Irma Yani. Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. (2018)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan, 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam pemberdayaan masyarakat Islam. Penelitian ini dilaksanakan di kelompok simpan pinjam di Desa Pematang Tengah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Tanjung Pura.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *interview* (wawancara) kepada pimpinan dan bendahara UPK PNPM serta masyarakat penerima program SPP di Desa Pematang Tengah, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Dari analisis yang diperoleh oleh penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) adanya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) menjadikan masyarakat sejahtera, terdapat peningkatan pendapatan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga dan masyarakat merasa terbantu dalam segi modal maupun segi sosial kemasyarakatan seperti adanya saling kepedulian terhadap sesama masyarakat melalui kelompok-kelompok yang telah dijalankan. (2) Implementasi yang dilakukan lembaga PNPM-MP pada program SPP di Desa Pematang Tengah tidak sesuai dengan apa yang ada di Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Terbukti dari syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana SPP tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) antara lain tidak memilih rumah tangga miskin sebagai sasaran utama. (3) adanya masyarakat yang tidak didanai lagi oleh pihak PNPM MP dikarenakan oleh penggunaan pinjaman dana SPP tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, serta adanya ketidak jujuran yang dilakukan oleh ketua kelompok dalam mengelola dana yang diberikan melalui program SPP.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia serta hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula *Shalawat* dan *Salam* penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dahulu sehingga saat ini kita dapat merasakan manisnya iman dalam Islam sebagai agama yang kita anut.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura”** yang dalam penulisan skripsi ini banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan kesungguhan yang dimiliki penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si selaku pembimbing skripsi I yang telah membekali saran serta masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Salamuddin, MA selaku sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, serta pembimbing skripsi II yang telah membekali saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen Pengembangan Masyarakat Islam yang telah membekali penulis dengan segudang ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.

7. Orangtua ku tercinta, ayahanda dan ibunda yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah mengasuh serta mendidik, dan yang tak henti-hentinya selalu memberikan ridho dan doa restu. Yang selalu mengajarkan arti penting sebuah kehidupan, dan yang selalu memberikan semangat untuk menjalani hidup.
8. Abangda tercinta Yusri Hidayat yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dan berjuang demi terselesaikannya perkuliahan ini.
9. Adik-adik ku Yuda Anshari dan Muhammad Ikhsan yang selalu memberi semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan lembaga PNPM MP serta staf-stafnya yang telah bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Ibu Dina Juliana yang telah bersedia menjadi Informan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) A dan B stambuk 2014, terkhusus Halimatus sakdiah, Holida dan Yayuk Sri Hidayati yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Atas keterbatasan penulis dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga Allah SWT. senantiasa memberi petunjuk bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 25 Juni 2018

Penulis

Irma Yani
13.14.3.006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORIRIS.....	15
A. Pengertian Implementasi	15
B. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.....	19
C. Konsep Pemberdayaan	25
1. Pengertian Pemberdayaan	25
2. Strategi Pemberdayaan	28
3. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan	32
D. Konsep Masyarakat Islam	34
E. Kajian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder	40
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46

A. Profil Desa.....	46
B. Keberhasilan Program SPP Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat	50
C. Kebijakan PNPM MP Dalam Menjalankan Program SPP.....	55
D. Faktor Yang Mendukung Berjalannya Program SPP.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DaftarPustaka.....	70
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.¹

kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara tidak memandang negara maju atau negara berkembang. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Krisis ini telah membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin.²

Problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi sebab-sebab lain seperti tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan

¹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75.

²*Ibid.* hlm. 76.

sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, serta pengangguran yang terus bertambah. Oleh karenanya kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global merupakan problem yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.³

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang hingga pada saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan agar masyarakat merasakan semua itu dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.⁴

Menjadi negara yang berkembang pemerintah disetiap kabupaten atau kota dan desa, pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan dan kesejahteraan sosial, serta semua pemberdayaan tidak hanya terpusat pada satu faktor saja tetapi juga tentang permasalahan perekonomian yang menjadi pekerjaan yang begitu berat, dalam pemberdayaan ini mencakup dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu meningkatkan

³*Ibid.*, hlm. 80.

⁴Randi R. wrihatnolo dan riant Nugroho Dwitjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo), hlm. 35.

kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri.⁵ Pemberdayaan dalam mengentas kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم

مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَآلٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra'd: 11).⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal pemberdayaan perlunya perubahan pada pola pikir masyarakat itu sendiri untuk berdaya, mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Maka dari itu perlu dibentuknya pemberdayaan pada masyarakat untuk memberi pelatihan pada masyarakat agar

⁵Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.58.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 250.

lebih mandiri dan dapat berupaya mensejahterakan individu atau masyarakat yang tidak terlepas dari keikutsertaan pihak pemerintah sebagai pemberi modal.

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan, tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan sebuah program yang khusus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat guna membantu dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas pemerintah senantiasa meluncurkan berbagai program berbasis konsep pemberdayaan, berbagai program tersebut mencoba menjawab tantangan mengenai peningkatan kapasitas (keberdayaan) masyarakat di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin baik daerah pedesaan maupun perkotaan.⁷ Salah satu program yang diluncurkan pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat tersebut adalah sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mencanangkan sebuah program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk para perempuan-perempuan yang memiliki usaha dengan pemberian modal guna membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, program simpan pinjam kelompok perempuan yang dilaksanakan di pedesaan belum sepenuhnya melibatkan

⁷Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, hlm. 80.

masyarakat sehingga masih banyak program kelompok simpan pinjam yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat mestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namun pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, sehingga menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek sasaran program melainkan sebagai subjek dan objek.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam menerapkan program simpan pinjam kelompok perempuan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan bagi mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti mencari sandang, pangan dan papan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi baru diberi modal usaha sesuai yang mereka bisa.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan ideologi pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Indonesia memiliki problem mengenai kemiskinan maupun pengangguran. Cara atau upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khusus yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan pengangguran adalah: Perpres No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan kemiskinan, surat keputusan Menkokesra No.

28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM-MP.⁸

Program ini sangat strategis karena dengan adanya sebuah program dalam hal pemberdayaan, masyarakat dapat menyiapkan landasan kemandirian bagi perkembangan modal sosial dimasa mendatang, serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilaksanakan di 4.371 Kecamatan di 32 Provinsi. Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat merupakan salah satu dari 4.371 kecamatan yang ada di Indonesia yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat melalui suatu kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Tanjung Pura terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan, Salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah Desa Pematang Tengah.

Dari hasil data yang diperoleh dari desa, jumlah penduduk Desa Pematang Tengah kurang lebih sebanyak 3000 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar adalah wiraswasta. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk Desa Pematang Tengah banyak yang menjalankan usaha-usaha kecil dalam membantu perekonomian keluarga seperti *home industry* yang kebanyakan masyarakat Desa Pematang Tengah lakukan.

⁸Republika Indonesia, “Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran”, (Yogyakarta: Liberty, 2005). hlm. 87.

Seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya dan lingkungannya. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Pematang Tengah sebelum diberlakukannya program SPP pada tahun 2007, masyarakat masih sangat sulit dalam mendapatkan penghasilan guna menghidupi keluarganya, hal ini dilihat dari banyaknya pengangguran di Desa Pematang Tengah diakibatkan kurangnya sumber daya yang tersedia.

Lantas seiring dengan pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan yang dilakukan PNPM-MP di Desa Pematang Tengah telah banyak membantu para pengusaha-pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya. Para pengusaha-pengusaha tersebut diberi bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dengan rincian pembayaran yang dilakukan setiap bulannya sebesar 0,1 % per bulannya atau 10 % per tahunnya. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang kembali menjalankan usahanya.

Perkembangan yang terjadi setelah diterapkannya program SPP di Desa Pematang Tengah memberi dampak baik pada perekonomian masyarakat yang diberi modal guna membantu mengembangkan usaha para pengusaha-pengusaha kecil tersebut. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang menunggu antrian untuk didanai oleh program SPP dalam menjalankan usaha mereka, yang saat ini hanya terdapat 5 kelompok peminjam yang terdiri dari 7-10 orang setiap kelompok yang didanai oleh program SPP.

Sejak berdirinya program SPP di Desa Pematang Tengah pada tahun 2007 hingga sekarang terdapat juga kelompok-kelompok peminjam yang tidak aktif atau tidak diberi bantuan modal usaha dikarenakan seringnya melakukan tunggakan pada pengembalian modal pinjaman, serta masih banyak masyarakat miskin yang masih membutuhkan permodalan untuk menjalankan usahanya. Dengan berbagai masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan PNPM-MP, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana **“Implementasi program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam pemberdayaan masyarakat islam”** di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Desa Pematang Tengah sebelum dan sesudah diberlakukannya program simpan pinjam kelompok perempuan ?
2. Bagaimana kebijakan dan penerapan yang dilakukan PNPM-MP dalam menjalankan program simpan pinjam kelompok perempuan ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menjalankan program simpan pinjam kelompok perempuan ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman akan judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹ Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, program atau tatanan kedalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.¹⁰ Implementasi menurut penulisan ini ialah sebuah penerapan atau suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan PNPM MP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

2. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Simpan pinjam adalah sebuah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha. Program simpan pinjam kelompok perempuan dalam penelitian ini adalah program simpan pinjam yang dicanangkan oleh PNPM-MP yang khusus bagi para perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dalam upaya membantu perekonomian keluarga demi mengurangi angka kemiskinan di Desa Pematang Tengah.

3. Pemberdayaan

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 529.

¹⁰Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 37.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan yang berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).¹¹

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pemberdayaan yang dimaksud penulis dalam penulisan ini adalah pemberdayaan agar masyarakat dapat menjalankan potensi yang ada guna membantu mensejahterakan kehidupan individu maupun masyarakat tersebut agar lebih mandiri.

4. Masyarakat Islam

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat juga dikatakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya yang terkait oleh sistem sosial melalui peranan solidaritas dengan dilatarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik dan kebudayaan.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 121.

masyarakat adalah kelompok manusia yang tetap cukup lama hidup dan bekerja bersama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Pada masyarakat terdapat semangat yang sama yang berfungsi menyatukan. Jadi yang dimaksud masyarakat Islam adalah masyarakat dengan semangat Islam sebagai penyatunya.

Dilihat dari pengertian masyarakat Islam di atas, masyarakat Islam bukan hanya sekedar masyarakat orang-orang Islam. Tetapi masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penulis adalah masyarakat Islam yang menjalankan program SPP di Desa Pematang Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk melihat keberhasilan program simpan pinjam kelompok perempuan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan perempuan.
2. Untuk mengetahui kebijakan serta penerapan yang dilakukan PNPM-MP dalam menjalankan program simpan pinjam kelompok perempuan.
3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dalam berjalannya program simpan pinjam kelompok perempuan yang dilakukan khusus untuk para perempuan-perempuan dalam menjalankan usahanya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:
 - a. Pihak lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang lebih giat dalam mengambil kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat miskin.
 - b. Pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memberdayakan khususnya diri sendiri serta dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan diri melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pihak pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin.
 - d. Pihak lembaga lain, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tolak ukur dalam menjalankan program-program dalam hal memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat miskin.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menentukan pembahasan, maka proposal ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari bab dan subbab yang saling berkaitan.

Bab pertama, merupakan bagian yang terdiri dari pendahuluan, pada pendahuluan akan dipaparkan latar belakang masalah yang menggambarkan sekilas tentang keadaan desa dan lembaga sebagai objek penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya, setelah latar belakang masalah dijelaskan pula rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan serta kajian terdahulu.

Bab kedua, dibahas akan lanjut tentang landasan teori yang dipergunakan. Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pengertian implementasi, program simpan pinjam kelompok perempuan, konsep pemberdayaan, serta konsep masyarakat Islam.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi bentuk penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yang meliputi semua hasil yang terkait berdasarkan tujuan penelitian. Bab kelima, membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang terkait bagi masyarakat, lembaga serta pemerintah desa dalam melakukan atau menjalankan program yang sesuai untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa merupakan suatu proses penerapan ide, program atau tatanan kedalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.¹²

Menurut Harsono mengemukakan Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹³ Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan atau menjalankan suatu program agar terciptanya akhir suatu kegiatan yang baik. Dalam hal ini dilakukannya implementasi pada suatu program sangat berperan dalam terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena dengan penerapan atau kebijakan yang dilakukan suatu program dengan baik maka hasil yang dilakukan juga akan baik. Jadi, keberhasilan suatu program dilihat dari bagaimana kebijakan dalam penerapan yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan dengan baik untuk menciptakan hasil yang baik maka semakin baik hasil yang didapat.

¹²Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, hlm. 37.

¹³Guntur Setiawan, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: Kencana, 2004), hlm. 39.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*.¹⁴ Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui: implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan serta pengendalian.¹⁵

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci, maka implementasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

Pada konsep implementasi, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim

¹⁴*Ibid*, hlm.42.

¹⁵*Ibid*, hlm. 43.

dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.¹⁶

Van Meter dan *Van Horn* mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Adapun makna implementasi menurut *Daniel A. Mazmanian* dan *Paul Sabatier* sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

¹⁶Edi Suharto, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 95.

¹⁷*Ibid*, hlm. 97.

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Pada penulisan ini Terdapat teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: Teori Merilee S. Grindle.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan tersebut menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.¹⁸

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan

¹⁸<http://www.bps.go.id>, diakses pada pukul 09.42 WIB, pada tanggal 28 Januari 2018.

- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dihasilkan¹⁹

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut implementor, penerima implementasi dan arena konflik mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

B. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan program ini dengan visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya

¹⁹ Edi Suharto, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, hlm. 99.

kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Serta misinya adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat (5) pembangunan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Hal ini jelas terdapat di dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkannya kita sebagai manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam hal

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, hlm. 106.

kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kegiatan simpan pinjam terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan sesama manusia.

Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.²¹

b. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan Dasar

²¹M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hlm. 12

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.²²

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dapat membantu para perempuan-perempuan rumah tangga dibidang usaha membantu perekonomian keluarga apalagi jika usaha tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian pokok dalam keluarganya.

Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi para perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharing power*, penetapan kemampuan dan

²²*Ibid*, hlm. 14.

penetapan kewenangan.²³ Pemberdayaan pada kegiatan simpan pinjam ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Menurut Parrons yang dikutip dari buku Anwas, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.²⁴

Selanjutnya menurut Ife dari buku yang sama, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.²⁵

Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam yang notabenenya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat sesuai konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan padaparagraf di atas.

²³Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 29.

²⁴Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 49.

²⁵*Ibid*, hlm. 50.

Dengan melihat pentingnya peran program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) pada masyarakat desa, penerapan kegiatan ini seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa tersebut. Pembagian yang merata terhadap permodalan yang dilakukan menjadi tolak ukur dalam menjalankan program ini sesuai dengan tingkat keperluan permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa khususnya di Desa Pematang Tengah ini demi membantu mensejahterakan para keluarga yang sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.

C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan berasal dari suku kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (tidak mencapai suatu maksud, pemecahan persoalan, mencari jalan keluar).²⁶ Pemberdayaan dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, proses pemberdayaan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata *Power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 121.

pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*Powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang ditempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *Power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang berdaya.²⁷

Pemberdayaan menurut Kartasasmita adalah upaya untuk membangun daya yang ada pada individu atau masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya. Pengertian pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan atau dapat pula disamakan dengan istilah pembangunan.²⁸

Sulistyani menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya,

²⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2013), hlm. 72.

²⁸Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja & Rosdakarya, 2001), hlm. 42.

kekuatan atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal yaitu merupakan kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kesejahteraannya.²⁹

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi sering kali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan

²⁹*Ibid.* 44.

dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, lingkungan serta aspek lainnya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

2. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material. Sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu *klien* untuk memperoleh daya, guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.³⁰

Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa

³⁰ WWW.Masyarakat Islam.com di akses pada 23 Februari 2018 pukul 19.00 Wib.

depannya dan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sutrisno menjelaskan dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda diantara para ahli, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator.

Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo menyebutkan cirri-ciri masyarakat berdaya yaitu:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan).
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
- e. Bertanggung jawab atas tindakannya.³¹

Diatas menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, namun pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang

³¹Hany Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), cetakan ke-2, hlm. 8.

berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen perubahan dapat melakukan pendekatan *Bottom-up*, dengan cara mengenali potensi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu: pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokong dan pemeliharaan.

Menurut Chamber dikutip oleh Anwas, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan.³²Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar.Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non formal.

Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas di lapangan, seperti: pegawai kelurahan desa, penyuluhan, guru, dosen, pegawai puskesmas, dokter, bidan dan profesi lapangan lainnya. Petugas non formal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan

³²Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 24

masyarakat baik yang dikelola dalam suatu lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal diantaranya: relawan pekerja sosial, kader PKK, kader posdaya, mahasiswa, ulama, simpatisan, dan yang lainnya.³³

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku untuk menuju kearah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, petugas yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebutkan sebagai agen pemberdayaan (*agent of empowerment*).³⁴

3. Tujuan dan Sasaran pemberdayaan

pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, merubah prilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut, tampak ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi,

³³Suderman M, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 207.

³⁴*Ibid.*, hlm. 185.

kemampuan untuk mengelola kegiatan dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara berswadaya, dalam hal ini adalah masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralsir belenggu-belenggu sosial yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat dan kedua pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuan dari sikap hidupnya.

Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana menguraikan tentang sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

- c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan.
- d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lebih lanjut *Talizuduhu Ndrana* berpendapat bahwa keempat sasaran pemberdayaan masyarakat diatas yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, pembangkitan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri melainkan diusahakan agar satu berkaitan dengan yang lainnya.

D. Konsep Masyarakat Islam

Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan yang terkait oleh sistem sosial melalui peranan solidaritas dengan dilatarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik dan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, karena manusia itu hidup bersama terbentuk karena hubungan dari anggotanya.³⁵

³⁵Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma dan Diskursus teknologi komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), hlm. 29.

Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka manusia itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur waktu yang cukup lama
- c. Mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan manusia belaka, akan tetapi diantaranya mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lain. Paling tidak setiap individu sebagai anggota (masyarakat) mempunyai akan kesadaran dan keberadaan individu lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup kerjasama yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.³⁶

Islam adalah suatu agama yang dianut oleh masyarakat dengan mempercayai adanya satu tuhan. Dalam Islam tuhan yang dipercayai oleh masyarakat yang menganutnya adalah Allah SWT. Ajaran-ajarannya pun banyak yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam Islam diajarkan bagaimana semestinya hidup berkemasyarakatan.

³⁶Soerjono Soekanto, *Struktur dan Proses Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 10.

Konsep masyarakat Islam awalnya mulai berkembang di Barat dengan sebutan masyarakat madani atau yang dikenal dengan istilah *civil society*. Menurut tokoh M. Ryaas Rasyid menyatakan bahwa *civil society* dalam arti masyarakat yang berbudaya berarti masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan. Ada juga yang mengartikan sebagai masyarakat warga atau masyarakat kewargaan, yang berarti bahwa masyarakat adalah anggota dari kelompok sosial tertentu yang salah satu ciri utamanya adalah otonom terhadap negara.

Masyarakat Islam (masyarakat madani) adalah suatu lingkungan interaksi sosial yang berada diluar pengaruh negara yang tersusun dari lingkungan masyarakat yang paling akrab seperti keluarga, asosiasi-asosiasi, sukarela dan gerakan masyarakat lainnya serta berbagai bentuk lingkungan dimana didalamnya masyarakat menciptakan kreatifitas, mengatur dan memobilisasi diri mereka sendiri tanpa keterlibatan negara. Masyarakat madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus yang mengikat jiwa pada kebaikan bersama. Hal ini dibuktikan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan bersama antar sesama masyarakat. Inilah konsep pemberdayaan masyarakat yaitu mau berbagi dan menciptakan kebahagiaan demi kebaikan bersama.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu: peneliti yang dilakukan oleh

Rahmad Hidayat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara tentang peran PNPM Mandiri Perdesaan (studi kasus di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). Dan masalah yang ditekankan disini adalah tentang peran PNPM dalam mensejahterakan masyarakat pedesaan melalui kelompok SPP.

Penelitian kedua adalah penelitian Juliarni Sipayung yang meneliti mengenai efektifitas pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan Pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah mengenai keikutsertaan masyarakat dalam upaya mengefektifkan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan melalui program simpan pinjam kelompok perempuan.

Dari dua penelitian diatas, peneliti pertama lebih fokus pada lembaga PNPM dalam menjalankan programnya melalui program SPP, dan penulis kedua lebih berfokus terhadap masyarakat sebagai pemanfaat dari program PNPM-MP sedangkan penulis lebih fokus pada lembaga PNPM dalam menerapkan serta mengelola program SPP di Desa Pematang Tengah dengan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapat uraian mendalam tentang ucapan, tingkahlaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.³⁷ Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan objek penelitiannya adalah lembaga PNPM Mandiri Perdesaan yang memberi manfaat pada masyarakat serta masyarakat itu sendiri sebagai pemanfaat dari pengolahan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh lembaga PNPM Mandiri perdesaan itu sendiri di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura . Lokasi lembaga PNPM MP yang menerapkan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah di Jalan Sei Wampu Karantina Desa Pekubuan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Adapun jarak antara Desa Pematang Tengah dengan kantor lembaga PNPM MP kurang lebih sekitar 3 KM.

C. Sumber Data

³⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 105

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sebagai data pokok yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi penanggung jawab atau ketua pada lembaga PNPM Mandiri Perdesaan serta ketua bidang program simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Tanjung Pura dan serta yang terkait dari staf-staf lembaga PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanjung Pura dan kemudian tidak lupa juga adanya informan dari masyarakat yang sebagai penerima manfaat dari program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atas data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada peneliti sebagai bahan pelengkap penelitian seperti buku-buku yang mendukung terhadap judul ini.

D. Informan Penelitian

Informan yang dikemukakan oleh Moleong adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.³⁸ Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 2 orang dari lembaga PNPM MP yaitu ketua serta bendahara umum UPK PNPM Mandiri

³⁸*Ibid*, hlm.95

Perdesaan Kecamatan Tanjung Pura, 2 orang yang berasal dari masyarakat yang menjadi pemanfaat pada program kelompok simpan pinjam perempuan, 1 orang yang berasal dari masyarakat non aktif atau yang sudah tidak didanai lagi pada program simpan pinjam kelompok perempuan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, diantaranya:

1. Nama : Ari Irawan Siregar
Alamat : Jl. Mesjid Kecamatan Tanjung Pura
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan/jabatan : Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Tanjung Pura
2. Nama : Dina Juliana
Alamat : Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah
Usia : 30 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara UPK PNPM-MP Kecamatan Tanjung Pura
3. Nama : Zahratul anggraini
Alamat : dusun kusuma, Desa Pematang Tengah
Usia : 37 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan/Jabatan : masyarakat / kelompok aktif SPP

4. Nama : Khairuna Zahra
Alamat : Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah
Usia : 28 Tahun
Status : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan/jabatan : Masyarakat / kelompok aktif SPP

5. Nama : Risda Yati
Alamat : Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah
Usia : 31 Tahun
Status : Ibu Rumah Tangga / Janda
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat / Kelompok SPP yang sudah fakum

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden yang mampu memberikan keterangan yang diperlukan oleh penulis yaitu penerapan yang dilakukan PNPM MP dalam mengelola dan menjalankan kegiatan simpan pinjam di Desa Pematang Tengah.

2. Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut. Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan program simpan pinjam dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura.
3. Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan. Menurut Sugiono, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatif.³⁹

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisaan dilakukan dengan analisa domain (*domain analysis*) maksudnya adalah peneliti hanya ditargetkan untuk

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2008), hlm.

memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Ulber⁴⁰, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstraksian, data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁴⁰UlberSilalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pematang Tengah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pematang Tengah adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas sebesar 250 Ha yang terdiri dari 4 dusun yaitu :

1. Dusun Fajar Desa Pematang Tengah
2. Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah
3. Dusun Kusuma Desa Pematang Tengah
4. Dusun Harapan Desa Pematang Tengah

Jarak Desa Pematang Tengah dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 3,5 Km, Jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten adalah 20 Km dan jarak dengan pusat pemerintahan Provinsi adalah 63 Km. Secara administrasi Desa Pematang Tengah mempunyai batas-batas wilayah, yaitu :

1. Batas Utara = Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura
2. Batas selatan = Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura
3. Batas Barat = Desa Seapuh ABC Kecamatan Padang Tualang
4. Batas Timur = Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pematang Tengah per Desember 2017 adalah berjumlah 2.899 Jiwa, dengan jumlah keluarga 831 kepala keluarga (KK). Penduduk Desa Pematang Tengah ini terdiri dari 1.510 laki-laki dan 1.389 perempuan.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Pematang Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.510	52%
2	Perempuan	1.389	48%
Jumlah		2.899	100%

Sumber : Data monografi Desa Pematang Tengah, 2017

Adapun jumlah penduduk Desa Pematang Tengah berdasarkan kepada pembagian dusun yaitu dapat dilihat di tabel di bawah ini .

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Pematang Tengah Berdasarkan Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Fajar	121 KK
2	Pelangi	155 KK
3	Harapan	354 KK

4	Kesuma	201 KK
Jumlah		831 KK

Sumber : Data monografi Desa Pematang Tengah, 2017

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan penduduk di Desa Pematang Tengah terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. adapun rata-rata pendidikan terakhir masyarakat di Desa Pematang Tengah ini adalah tamat SMA.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Pematang Tengah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Belum Sekolah	195
2	Belum Tamat SD	366
3	Tamat SD/ Sederajat	618
4	Tamat SMP/ Sederajat	382
5	Tamat SMA/ Sederajat	790
6	Akademi/ Perguruan Tinggi	142

Sumber : Data Monografi Desa Pematang Tengah

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk desa Pematang Tengah berdasarkan KK pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai Buruh harian lepas, Pedagang, PNS, Karyawan Swasta,

Buruh pabrik, Buruh Tani, Petani, Angkutan dan lainnya. dari data ini kita dapat melihat banyak masyarakat di Desa Pematang Tengah yang bekerja sebagai Buru Harian Lepas. Dibawah ini dapat dilihat secara terperinci jumlah penduduk menurut mata Pencaharian.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Harian Lepas	195
2	Pedagang	194
3	Petani	18
4	Buruh Tani	13
5	PNS/TNI/POLRI	58
6	Buruh Pabrik	89
7	Karyawan swasta	89
8	Supir	20
9	Pensiun	25
10	Nelayan	1

Sumber : Data Monografi Desa Pematang Tengah

B. Keberhasilan Program SPP Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat

Perekonomian merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani kehidupan, dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pematang Tengah masuk kedalam kategori keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti kebutuhan

sandang, pangan, papan dan juga kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan interaksi dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal.

Dari banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat sejahtera, namun banyak juga masyarakat yang termasuk kedalam kategori masyarakat menengah kebawah (miskin). Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Pematang Tengah sebanyak 50 % dari jumlah keseluruhan masyarakat dengan rincian janda miskin sebanyak 15 % dan keluarga miskin sebanyak 35 % pada tahun 2017.⁴¹

Untuk mengatasi persoalan banyaknya masyarakat miskin, pihak PNPM mencanangkan sebuah program untuk mendanai masyarakat dengan pemberian modal bagi mereka yang memiliki usaha terkhusus bagi para perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga. Dalam program ini yang dikhususkan adalah bagi perempuan-perempuan rumah tangga dengan alasan karena perempuan-perempuan lebih teliti dalam mengelola keuangan sehingga beranggapan bahwa dengan pemberian modal terhadap para perempuan dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

Program SPP di desa Pematang Tengah bermula dari berdirinya program PNPM MP di Kecamatan Tanjung Pura yaitu pada tahun 2007 sebanyak tujuh kelompok dengan usaha yang berbeda-beda antara lain:

1. Menjalankan usaha warung sembako
2. Membuka toko pakaian

⁴¹Data Monografi Desa Pematang Tengah

3. Menjual berbagai jenis makanan seperti warung bakso, rumah makan, jajanan-jajanan kecil, dll.
4. *home industri*
5. WO (Wedding Organizer)

Dilihat dari hal ini terdapat peran dari pihak PNPM dalam menjalankan program SPP di Desa Pematang Tengah dalam membantu mensejahterakan perekonomian keluarga. Meningkatnya perekonomian keluarga miskin di Desa Pematang Tengah melalui program SPP yang dijalankan oleh PNPM terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari tahun 2007 pada saat dimulainya program SPP angka kemiskinan mencapai 62 % dari keseluruhan masyarakat dan menurun menjadi 50 % pada tahun 2017.⁴² Hal ini walaupun terlihat peningkatan yang sangat rendah akan tetapi dapat dikatakan bahwa pihak PNPM dalam menjalankan program SPP dapat dinilai memberikan perubahan perekonomian masyarakat di Desa Pematang Tengah.

Dari hasil wawancara terhadap salah seorang masyarakat penerima program SPP ibu Zahratul Anggraini menyatakan bahwa dengan adanya program SPP memberikan peluang baginya untuk menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁴³

Hal yang sama juga dinyatakan oleh ibu Khairina Zahra selaku ketua kelompok masyarakat penerima program SPP bahwa dengan adanya program ini

⁴²*ibid*

⁴³Zahratul Anggraini, Masyarakat Penerima Program SPP Desa pematang Tengah, Wawancara Pribadi, Dusun Kusuma Desa pematang Tengah, 5 April 2018

merupakan hal yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kembali perekonomian keluarganya. Program ini merupakan wadah bagi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat, karena dengan adanya program ini dapat memberi peluang-peluang bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk dapat menjalankan kembali usahanya menjadi lebih baik.⁴⁴

Selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap bendahara UPK PNPM MP kecamatan Tanjung Pura yaitu ibu Dina Juliana menyatakan bahwa program SPP yang dijalankan PNPM sangat membantu masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya bagi mereka yang benar-benar melaksanakan dengan baik program ini. Dalam hal ini terdapat tujuh kelompok masyarakat penerima program SPP di Desa Pematang Tengah. Dari tujuh kelompok tersebut dua diantaranya masyarakat yang tidak lagi diberi bantuan modal oleh pihak PNPM.⁴⁵

Pimpinan lembaga UPK PNPM bapak Ari Irawan Siregar mengatakan bahwa adanya masyarakat non aktif atau masyarakat yang tidak diberi bantuan modal lagi oleh pihak PNPM dikarenakan oleh 2 faktor antara lain:

1. Faktor pertama, masyarakat tidak diberi bantuan modal lagi oleh pihak PNPM MP dikarenakan masyarakat penerima program tersebut telah mampu mengembangkan dana pinjaman yang dilakukan per kelompok

⁴⁴Khairina Zahra, Masyarakat Aktif Penerima Program SPP Desa Pematang Tengah, Wawancara pribadi, Dusun Fajar Desa Pematang Tengah, 02 April 2018

⁴⁵Dina Juliana, Bendahara UPK PNPM-MP Kecamatan Tanjung Pura, wawancara Pribadi, Dusun Fajar Desa Pematang Tengah, 01 April 2018

dengan baik. Tanpa didanai lagi oleh pihak PNPM mereka telah mampu untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

2. Faktor kedua, alasan masyarakat tidak lagi didanai oleh pihak PNPM MP melalui program SPP dikarenakan masyarakat tersebut tidak menggunakan dana yang diperuntukkan menjalankan usaha dengan baik. Dana yang digulirkan terhadap kelompok digunakan untuk keperluan lain sehingga usaha tidak berkembang dengan baik.⁴⁶

Di Desa Pematang Tengah penyebab terjadinya masyarakat non aktif yang tidak lagi didanai oleh pihak program diakibatkan oleh faktor yang kedua. Dalam satu kelompok masyarakat penerima program SPP terdapat beberapa orang diantaranya yang tidak menyesuaikan kebutuhan pendanaan permodalan yang digulirkan pihak PNPM, akibatnya seluruhnya masyarakat dalam satu kelompok tersebut tidak lagi diberi izin untuk mendapat dana bergulir SPP dari pihak PNPM.

Hal diatas terlihat dari menurunnya produksi dari usaha yang dilakukan masyarakat tersebut. Terlihat dari tidak adanya lagi masyarakat yang menjalankan usaha (berjualan) ditempat yang disediakan oleh pihak desa. Pihak pemerintah desa telah membuat suatu wadah (tempat) yang dipergunakan bagi siapapun masyarakat Desa Pematang Tengah yang menjalankan usaha . Dari hasil penelitian bahwa masyarakat yang berjualan di tempat yang disediakan pihak pemerintah desa adalah mereka yang menerima dana bergulir program SPP.

⁴⁶Ari Irawan Siregar, Pimpinan Lembaga UPK PNPM MP Kecamatan Tanjung Pura, Wawancara Pribadi, Jalan Karantina Kecamatan Tanjung Pura, 28 Maret 2018

Disebut dana bergulir karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang dicanangkan pada masa pemerintahan presiden SBY yang dimulai pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. Akan tetapi dana yang dikelola selama kurang lebih 7 tahun tersebut masih berlanjut dan dikelola dengan baik hingga saat ini.

Dalam hal tersebut keberhasilan program SPP dalam peningkatan terhadap perekonomian masyarakat dapat dilihat dari masyarakat yang benar-benar menjalankan program SPP dengan baik, akan tetapi terhadap masyarakat yang tidak menjalankan dengan baik dan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan PNPM tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Kebijakan PNPM dalam menjalankan program SPP

Pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu PNPM di buat untuk menjadi suatu wadah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas yang ada pada diri mereka dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi mandiri serta menjadi pelengkap bagi mereka yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan lembaga PNPM MP bapak Ari Irawan Siregar beliau mengatakan bahwa dalam program SPP yang berjalan di Kecamatan Tanjung Pura ini bukan hanya sekedar pemberian modal usaha bagi

para perempuan-perempuan rumah tangga untuk menjalankan usahanya akan tetapi lebih kepada pemberdayaan yang diperkuat melalui bantuan pinjaman modal bagi mereka yang menjalankan usaha.⁴⁷

Untuk mengefektifkan berjalannya program serta terealisasikannya proses pemberdayaan yang menjadi tujuan utama program nasional pemberdayaan masyarakat ini, maka pihak program menentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap peminjam yaitu :

- 1) Melakukan pertemuan/bimbingan

pertemuan dilakukan wajib setiap bulannya dengan berkumpulnya anggota pada suatu kelompok untuk melakukan transaksi pembayaran yang didampingi pihak program. Bimbingan yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima program SPP dalam bentuk membahas atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelompok yang menjalankan usaha serta mencari solusi bersama serta menumbuhkan ide-ide baru dari masyarakat dalam mengelola dana bersama tersebut. Khusus bagi masyarakat yang menjalankan usaha *home industri* dibimbing dalam hal mengelola/menyalurkan hasil produksi ke pasaran.

Lima kelompok yang ada di desa Pematang Tengah wajib melakukan pertemuan yang pada umumnya dipertemuan itulah kelompok melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

⁴⁷*Ibid.*

1. Kelompok 1 melakukan peminjaman sebesar 50 juta dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 4.520.000,00,- per bulannya.
2. Kelompok 2 melakukan peminjaman sebesar 65 juta dengan rincian pembayaran Rp. 5.750.000,00,- per bulannya
3. Kelompok 3 melakukan peminjaman sebesar 30 juta dengan rincian pembayaran sebesar Rp.2.750.000,00,- per bulannya.
4. Kelompok 4 melakukan peminjaman sebesar 30 juta dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 2.750.000,00,- per bulannya
5. Kelompok 5 melakukan peminjaman sebesar 20 juta dengan rincian pembayaran sebesar 1.870.000,00,- per bulannya.

Dari rincian peminjaman dan pembayaran yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut, terdapat jasa yang diperoleh pihak PNPM-MP sebesar 10 % per tahunnya bagi setiap kelompok. 10% tersebut diperuntukkan bagi PNPM dalam mengelola dana pinjaman tersebut dengan lebih besar dan lebih baik lagi.

Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun, dengan rincian tersebut di atas. Tujuan dilakukannya pertemuan ini apabila ada masyarakat yang tidak dapat hadir atau tidak dapat melakukan pembayaran maka adanya tanggung renteng untuk menutupi kekurangan dari salah satu masyarakat yang tidak hadir atau tidak melakukan pembayaran. Dari situlah pemberdayaan dari segi kepedulian sosial dilakukan.

- 2) Melakukan pemberdayaan

Pemberdayaan dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik, dengan ikut melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap kelompok guna meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu berdaya serta dengan dilakukannya pertemuan kelompok setiap bulannya dapat meningkatkan solidaritas antar sesama, menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk aktif serta lebih mandiri.

Bapak Ari Irawan Siregar dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa pinjaman yang dilakukan hanyalah *stimulant* atau pemancing bagi masyarakat agar mau berkelompok, berbagi cerita, mau bersatu memecahkan permasalahan yang terjadi di kelompok, serta peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat menjadi lebih tinggi.⁴⁸

Pemberdayaan yang dilakukan juga dalam hal melakukan bimbingan atau melakukan pengarahan terhadap usaha masyarakat agar dapat bersaing di pasaran sehingga dapat memproduksi hasil yang baik dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Bantuan yang dilakukan PNPM dalam melancarkan usaha masyarakat merupakan usaha yang dilakukan pihak PNPM dalam memberdayakan masyarakat tersebut. Selagi masyarakat mau untuk dibantu maka pihak PNPM telah melakukan pemberdayaan tersebut karena membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya merupakan suatu pemberdayaan karena hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

⁴⁸*Ibid.*

Selain kebijakan yang diberlakukan bagi masyarakat yang sedang menjalankan program, terdapat pula beberapa kebijakan atau persyaratan yang dilakukan bagi masyarakat yang ingin menerima pinjaman modal berupa dana yang diberikan oleh pihak PNPM melalui program SPP tersebut.

Program yang masuk ke desa di sosialisasikan ke masyarakat dengan cara disampaikan melalui pihak pemerintahan desa. Pihak program mensosialisasikan program ke pihak desa untuk disampaikan ke masyarakat desa yang membutuhkan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pihak program melakukan beberapa persyaratan serta proses yang dilakukan untuk memudahkan berjalannya program dengan baik antara lain:

1. Untuk dapat melakukan pinjaman masyarakat harus mengajukan proposal pinjaman dengan melengkapi berkas-berkas seperti KTP, KK, surat keterangan kepala desa, surat izin usaha serta surat rencana anggaran biaya.
2. sudah ada keterangan dari kepala desa bahwasanya kelompok itu berada di desa tersebut dan sudah memiliki kelompok dan sudah berjalan selama 1 tahun.
3. Untuk dapat melakukan pinjaman masyarakat harus memiliki uang kas sendiri serta dapat mengelola uang tersebut walaupun kecil.
4. Setelah masyarakat melengkapi proposal dilakukan pembahasan awal oleh orang-orang dari pihak program dengan melakukan verifikasi kelengkapan.

5. Selanjutnya pembahasan akhir, untuk melakukan pengguliran dana dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan disitulah penentuan untuk berhak atau tidaknya masyarakat untuk digulirka dana.

Dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak PNPM tersebut di atas, tergolong kedalam masyarakat tidak mampu (miskin) bukan menjadi persyarakatan utama bagi masyarakat penerima bantuan dana program SPP. Hal ini terlihat dari pernyataan dari pihak program yang menyataka bahwa syarat yang paling utama untuk dapat menjadi penerima program harus mempunyai kelompok dengan anggota yang cukup serta punya usaha yang dijalankan asalkan bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) siapapun berhak menerima dana bergulir SPP.

Hal ini juga terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa ada diantara pihak program yang tidak tergolong kedalam masyarakat miskin, akan tetapi dalam menjalankan usaha dan mengembangkannya memang membutuhkan modal yang besar tetapi dilihat dari kebutuhan pokoknya sangat mencukupi.

Dari kebijakan yang tertulis diatas bahwa harus memiliki kelompok yang berjalan minimal 1 tahun tidak sepenuhnya sesuai dengan kelompok yang telah berjalan di Desa Pematang Tengah saat ini. Banyak diantara masyarakat penerima program yang sama sekali tidak pernah ikut perkelompokan sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat penerima program SPP yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan perkelompokan sebelumnya selain pada program SPP ini.

Di Desa Pematang tengah terdapat tujuh kelompok peminjam, lima diantaranya adalah kelompok yang masih aktif sampai saat ini penerima program SPP dan dua diantaranya adalah kelompok yang tidak diberi lagi bantuan dana bergulir oleh pihak PNPM. Hal ini diakibatkan karena pihak kelompok tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak program seperti melakukan pertemuan untuk melakukan pembayaran. Dua dari kelompok tersebut telah melakukan permasalahan seperti tidak mau melakukan pembayaran.

Adanya masyarakat non aktif tersebut yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh pengelolaan uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan pokok keluarga lebih besar dibandingkan pendapatan dari hasil usaha yang dijalankan serta ketidak ikutsertaan mereka dalam melakukan perkumpulan menjadi nilai tersendiri bagi pihak PNPM MP yang menekankan kebijakan pemberdayaannya.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat kelompok peminjam yang tidak didanai lagi oleh pihak PNPM MP ibu Risda Yati beliau mengatakan bahwa banyaknya kebutuhan dan keperluan rumah tangga lain yang menyebabkan pinjaman yang diberikan tidak semata-mata untuk menambah modal dalam mengembangkan usaha, akan tetapi banyaknya kebutuhan dan keperluan lain sedangkan mata pencaharian lain beliau tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah

tangga serta anak-anaknya. Oleh karena itu peminjaman yang dilakukan sebagian dipergunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya.⁴⁹

Alasan lain dari adanya masyarakat yang bermasalah dalam menjalankan program SPP dilihat dari pernyataan oleh bendahara UPK PNPM-MP bahwa kelompok bermasalah yang ada di desa Pematang Tengah diakibatkan oleh ketua kelompok yang tidak jujur dalam mengelola dana pinjaman tersebut, oleh sebab itu perorangan dari kelompok tersebut enggan untuk melakukan pembayaran dikarenakan ketidak jujuran ketua kelompok dalam melakukan pembayaran tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak semata-mata dilepas begitu saja oleh pihak program, melainkan dicarikan solusi bersama untuk mengaktifkan kembali kelompok tersebut. Pihak program memberikan toleransi kepada kelompok untuk melakukan kembali pembayaran serta mengikuti kembali prosedur yang dibuat oleh PNPM-MP, akan tetapi semua kembali kepada perorangan dan kelompok, ada memang masyarakat yang tidak mau lagi melakukan pembayaran, jika memang kelompok tersebut dapat melakukan kembali pembayaran dengan baik maka pihak program masih tetap menggulirkan dana kepada kelompok tersebut. Akan tetapi masyarakat memang tidak lagi mau melakukan pembayaran, oleh sebab itu maka pihak program tidak lagi menggulirkan dana kepada kelompok tersebut.

D. Faktor Yang Mendukung Berjalannya Program SPP

⁴⁹Risma Yanti, Masyarakat Fakum Penerima Program SPP Desa Pematang Tengah, Wawancara Pribadi, Dusun Fajar Desa Pematang Tengah, 10 April 2018

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitifitas perempuan untuk dapat berdaya dan diberdayakan sehingga memberikan peningkatan terhadap taraf hidup yang lebih baik. Dalam hal ini yang diberdayakan adalah para perempuan-perempuan rumah tangga dalam upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Banyak faktor-faktor yang menjadi tolak ukur lembaga program nasional pemberdayaan masyarakat ini dalam memberikan bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan antara lain:

1. Faktor pertama dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang sangat minim, sehingga program SPP dibuat dan digulirkan kepada masyarakat.
2. Faktor kedua dilihat dari kondisi kepala rumah tangga yang khusus di Desa Pematang Tengah banyak kepala rumah tangga yang bekerja sebagai buruh harian lepas (BLH), dilihat dari pekerjaannya tersebut masih minim perekonomian dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
3. Faktor ketiga tidak dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat, akan tetapi dilihat dari kebutuhan akan modal usaha yang diperlukan masyarakat dalam mengelola usahanya menjadi lebih besar dan lebih maju.

Khusus di Desa Pematang Tengah ketiga faktor di atas menjadi menjadi faktor pendukung atau tolak ukur program dalam menggulirkan dana bantuan SPP

kepada masyarakat. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang minim serta penghasilan keluarga yang tidak mencukupi. Akan tetapi program SPP ini tidak hanya diberikan terhadap masyarakat yang minim perekonomian pokok, akan tetapi masyarakat yang membutuhkan modal usaha juga diberi kesempatan untuk melakukan pinjaman dari dana bergulir SPP.

Dari beberapa faktor pendukung bergulirnya dana SPP, Tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi melihat penerima program SPP adalah para perempuan-perempuan rumah tangga.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program SPP yaitu :

1. Waktu

Kebijakan yang dibuat oleh pihak program yaitu melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap bulannya menjadi sebuah kendala yang dihadapi sebagian masyarakat penerima program SPP. Mengingat mereka sebagai penerima adalah ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan-kesibukan mengurus rumah tangga disamping menjalankan usaha.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat ibu Zahratul Anggraini masyarakat aktif penerima program SPP, beliau sebagai ketua dalam suatu kelompok mengatakan bahwa hal tersulit dalam melakukan pemberdayaan ini adalah terhadap kelompok itu sendiri, mulai dari mengumpulkannya, menjadwalkan pertemuan yang dilakukan setiap bulannya, menyatukan pikiran-pikiran dari masing-masing orang. Karena yang dihadapkan saat ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban terhadap rumah tangganya. Sulit

menyatukan jadwal yang tepat untuk mereka berkumpul merembukkan hal-hal yang harus diselesaikan dan melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut. Termasuk juga beliau yang harus berjualan disamping kewajibannya mengurus rumah tangga.⁵⁰

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk diberdayakan

Pihak program yaitu lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dalam menjalankan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) telah membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan melakukan perkumpulan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam hal berkelompok, serta saling memunculkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas diri dalam meningkatkan perekonomian.

Dalam hal ini kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi yang ada pada dirinya demi kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan masyarakat masih bergantung pada pemberian bantuan dari pihak pemerintah saja, akan tetapi dalam menggali potensi dirinya sendiri masih sangat minim kesadaran masyarakat.

Tujuan dilakukannya perkumpulan selain untuk melakukan pembayaran dana pinjaman juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mau peduli akan lingkungan masyarakat serta dapat melatih potensi yang ada pada diri mereka untuk kemudian dikembangkan melalui perumpulan serta *sharing-sharing* ide kepada masyarakat lainnya. Dengan adanya itu masyarakat semakin yakin

⁵⁰Zahratul Anggraini, Masyarakat Aktif Penerima Program SPP Desa Pematang Tengah, Wawancara Pribadi, Dusun Kusuma Desa Pematang Tengah, 05 April 2018

akan adanya potensi dirinya yang dapat membantu meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu pihak program sangat menganjurkan untuk masyarakat melakukan pertemuan serta menumbuhkan ide-ide baru dalam mengelola dana bergulir yang dikelola masing-masing atau perkelompokan.

Menurut pimpinan lembaga PNPM MP dari hasil wawancara peneliti bahwa kesadaran masyarakat itu sendiri untuk diberdayakan masih sangat sulit, sulitnya untuk melakukan pertemuan dan perkumpulan serta sulitnya suatu kelompok untuk diberdayakan itulah hal yang menjadi kendala dari pihak program dalam menjalani kegiatan ini. Hal itulah yang menjadi penilaian tersendiri bagi pihak program untuk mengukur sejauhmana masyarakat itu mau diberdayakan sehingga hal tersebut pulalah yang menjadi tolak ukur program dalam menggulirkan dana selanjutnya kepada suatu kelompok sehingga adanya kelompok yang tidak digulirkan lagi dana diakibatkan hal tersebut.⁵¹

⁵¹Ari Irawan Siregar, Pimpinan Lembaga UPK PNPM Kecamatan Tanjung Pura, Jalan Karantina Kecamatan Tanjung Pura, 28 Maret 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan adanya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat yang menjalankan program SPP tersebut. Hal ini dilihat dari tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, serta menurunnya angka kemiskinan yang ada di Desa Pematang Tengah.

Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya lagi pemberian modal usaha kepada masyarakat diakibatkan karena pengelolaan dana dari program SPP digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dari pihak program diperuntukkan menjalankan usaha, akan tetapi kebutuhan lain yang menyebabkan tidak terjadinya perputaran modal usaha seperti yang diharapkan sehingga untuk pengembalian dana dikhawatirkan seringnya melakukan tunggakan.

Berjalanya program SPP di Desa Pematang Tengah dilihat dari beberapa faktor yang menjadi tolak ukur PNPM MP yaitu melihat kondisi mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah Buruh Harian Lepas (BHL), serta kondisi perekonomian masyarakat yang masih sangat minim dan kebutuhan akan modal usaha menjadi faktor digulirkannya dana SPP di Desa Pematang Tengah tersebut.

Adanya kelompok yang tidak didanai lagi oleh program SPP diakibatkan karena kurangnya partisipasi masyarakat tersebut untuk berdaya dan diberdayakan serta adanya ketidakjujuran dari ketua kelompok dalam mengelola dana bergulir tersebut. Oleh karena itu dalam menjalankan program SPP ini pihak PNPM memberikan kebijakan agar masyarakat yang menjalankan program mau berdaya dan diberdayakan. Kebijakan yang dilakukan antara lain melakukan pertemuan guna melakukan pembayaran serta adanya keterbukaan terhadap kelompok sehingga adanya ketidakjujuran tidak terjadi pada suatu kelompok.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pematang Tengah penerima program SPP hendaknya lebih ditingkatkan kesadaran akan pemberdayaan diri apalagi dengan adanya program SPP memudahkan kita untuk berdaya dan diberdayakan.
2. Bagi pihak lembaga dalam menjalankan program SPP hendaknya sayarat utama untuk mendapatkan dana SPP tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sehingga dana tersebut dapat terealisasi sesuai kebutuhan bagi yang sangat membutuhkan.
3. Bagi pihak pemerintah desa hendaknya melibatkan seluruh masyarakat miskin sebagai calon penerima program SPP dari lembaga PNPM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2006, *Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma dan Diskursus teknologi komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *KBBI Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmat, Hany, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press
- <http://www.bps.go.id>, diakses pada pukul 09.42 WIB, pada tanggal 28 Januari 2018.
- J Moleong, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tajwid*, 2010, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- M, Suderman, 2001, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- M. Anwas, Oos, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.

Nanih Machendrawati dan agus Ahmad Syafe'I, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi*, bandung: Remai & Rosdakarya.

Randi R. wrihatnolo dan riant Nugroho Dwitjowijoto, 2010, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT elex Media Komputindo.

Razak, Intan Abdul, 2012, *Strategi Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Republika Indonesia, 2005, "*Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran*", Yogyakarta: Liberty.

Setiawan, Guntur, 2004, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Bandung: Kencana.

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

soekanto, Soerjono, 1990, *Struktur dan Proses Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; Alfabeta.

Suharto, Edi, 2007, *Kebijakan sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan edisi kedua* Jakarta: Kencana.

Tuasikal, M. Iqbal, 2012, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP.

WWW.Masyarakat Islam.com di akses pada 23 Februari 2018 pukul 19.00 Wib.

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta:

Pernada Media Group.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Irma Yani

TTL : Pematang Tengah, 21 Desember 1996

Asal Daerah : Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat

Alamat : Dusun Fajar Desa Pematang Tengah

No. HP : 0822-7281-0460

B. Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SDN 056021 Pematang Tengah
(Lulus dan Berijazah)

Tahun 2008-2011 : MTS Negri Tanjung Pura
(Lulus dan Berijazah)

Tahun 2011-22014 : MAN 2 Tanjung Pura
(Lulus dan Berijazah)

Tahun 2014- sekarang: S1 UIN Sumatera Utara
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara terhadap impinan dan bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Tanjung Pura.

A. Tujuan Penelitian 1

1. Bagaimana PNPM MP dalam mengelola program SPP di Desa Pematang Tengah ?
2. Perkembangan apa yang terlihat dari setiap kelompok peminjam di Desa Pematang Tengah ?
3. Dalam berjalannya program ini, apakah ada masyarakat yang melakukan tunggakan ?
4. Apa sangsi bagi mereka yang melakukan tunggakan ?
5. Apa faktor utama masyarakat tidak agi diberi dana bergulir SPP oleh pihak PNPM MP ?

B. Tujuan Penelitian 2

1. Apa syarat bagi suatu kelompok jika ingin melakukan pinjaman dana bergulir SPP ?
2. Setelah melakukan pinjaman apakah ada kebijakan-kebijakan yang diakuakan untuk melancarkan proses berjalannya program ?
3. Bagaimana prosedur pengembalian pinjaman yang dilakukan suatu kelompok ?
4. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pihak program dalam mengatasi kelompok yang bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian 3

1. Apa yang menjadi tolak ukur PNPM dalam menerapkan program SPP disetiap desa ?
2. Faktor apa yang mendukung berjalannya program SPP ?
3. Apa kendala yang dihadapi pihak PNPM MP dalam menjalankan/menerapkan program SPP di Desa Pematang Tengah ?

Wawancara terhadap masyarakat Desa Pematang Tengah penerima program SPP

A. Tujuan Penelitian 1

1. Apa usaha yang sedang ibu jalankan ?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian setelah ibu mendapat bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha ibu ?
3. Berapa total pinjaman yang ibu dan kelompok ibu lakukan ?
4. Apa yang dilakukan suatu kelompok jika ada diantara kelompoknya yang melakukan tunggakan ?

B. Tujuan Penelitian 2

1. Apa syarat yang diminta program untuk setiap orang/kelompok agar mendapat pinjaman dana bergulir ini ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan uang pada kelompok ibu ?
3. Bagaimana prosedur pengembalian yang kelompok itu akukan ?
4. Apakah ada persyaratan atau kebijakan lain dari pihak program setelah ibu mendapatkan dana ?
5. Apakah ada sangsi jika ibu atau kelompok tidak mengikuti atau melanggar kebijakan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian 3

1. Apa faktor utama ibu melakukan pinjaman pada program ini ?
2. Setelah ibu melakukan pinjaman, apakah ada kendala yang ibu hadapi baik itu dalam hal pengelbalian maupun dalam hal lain ?
3. Apakah suami ibu mendukung ibu melakukan pinjaman ini ?
4. Apa kendala yang ibu dak keompok ibu alami dalam menjalani kebijakan yang program ini tetapkan ?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama pimpinan lembaga PNPM MP Kecamatan Tanjung Pura (Bapak Ari Irawan Siregar) di Kantor PNPM MP Kecamatan Tanjung Pura, Jalan Sei Wampu Karantina Desa Pekubuan.



Perkumpulan yang dilakukan setiap bulan oleh kelompok penerima SPP serta melakukan transaksi pembayaran.



Proses penyerah terimaan dana bantuan SPP kepada masyarakat oleh pihak PNPM MP.



Kantor lembaga PNPM Kecamatan Tanjung Pura (Jalan Sei Wampu Karantina
Desa Pekubuan)